

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam kategori negara yang rawan mengalami bencana alam karena faktor geografis dan kondisi cuacanya (Wulandari & Salam, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana, dalam hal ini bencana ialah suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang membahayakan dan mengacaukan tatanan hidup serta mata pencaharian masyarakat. Penyebabnya dapat berasal dari faktor alam, dan biasanya dari ulah manusia sendiri yang berakibat pada hilangnya nyawa, kerusakan ekosistem, kehilangan aset material, serta pengaruh psikis. Bencana juga dipandang sebagai peristiwa yang memberikan efek signifikan terhadap kehidupan manusia.

Indonesia sering mengalami bencana alam, dengan banjir menjadi yang paling umum terjadi. Penyebab utamanya terkait dengan posisi astronomis negara ini, pada hal ini berlokasi antara 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT, yang berarti beriklim tropis. Curah hujan di Indonesia cukup tinggi, berkisar dari 700 mm hingga 7000 mm setiap tahun, sehingga suhu udara cenderung panas. Beberapa hal yang memicu banjir antara lain tingginya volume hujan, minimnya kemampuan waduk atau bendungan untuk menampung air, kesalahan dalam pembangunan fasilitas umum, sedimentasi di sungai, serta perencanaan tata kota yang kurang baik (Rahmaniah, 2021). Masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam mencegah dan menanggulangi banjir, seperti dengan menjaga dan melestarikan

lingkungan sekitar. Dalam aspek ini menunjukkan bahwa penanggulangan masalah banjir ini tidak semata bukan pemerintah saja namun masyarakat harus ikut andil di dalam.

Indonesia perlu menjalin kerja sama di bidang penanggulangan bencana, mengingat negara ini menempati peringkat ke-2 dengan tingkat risiko sebesar 43,50% (kategori tinggi) dari 193 negara yang paling rawan terhadap bencana (Frege et al., 2023). Indonesia sering mengalami tiga jenis bencana yang dapat menimbulkan kerusakan parah pada infrastruktur dan properti, yaitu gempa bumi, banjir, serta tanah longsor. Kejadian-kejadian ini menimbulkan dampak finansial yang besar, memaksa pemerintah untuk mengalokasikan dana yang tidak sedikit. Antara tahun 2000 dan 2016, kerugian rata-rata yang dialami negara akibat bencana alam dan non-alam mencapai angka Rp22,8 triliun setiap tahunnya.

| Rank | Country | Risk |
|------|--------------------|-------|
| 1. | Philippines | 46.86 |
| 2. | Indonesia | 43.50 |
| 3. | India | 41.52 |
| 4. | Mexico | 38.17 |
| 5. | Colombia | 37.64 |
| 6. | Myanmar | 36.16 |
| 7. | Mozambique | 34.61 |
| 8. | Russian Federation | 28.20 |
| 9. | Bangladesh | 27.29 |
| 10. | China | 27.10 |
| 11. | Pakistan | 26.45 |
| 12. | Papua New Guinea | 26.30 |
| 13. | Peru | 25.55 |
| 14. | Somalia | 25.09 |
| 15. | Yemen | 24.39 |
| 15. | Vietnam | 24.39 |

Figure 2:
Excerpt from the
WorldRiskIndex 2023

Gambar 1.1 Resiko Bencana dari Beberapa Negara

Sumber: World Risk Index, 2023

Salah satu bencana yang kerap terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia setiap tahun adalah banjir. Upaya penanggulangannya selama ini terkesan belum maksimal dan dilakukan secara tidak terkoordinasi. Menurut Menteri PUPR, penanganan masalah ini harus dilakukan secara terpadu melalui kerja sama multisektor, melibatkan semua pemangku kepentingan dengan tujuan bersama untuk mencari solusi yang berkelanjutan (Irawan, 2022). Dalam hal ini banjir bisa dikatakan dimana ketika volume air hujan melebihi kemampuan sungai atau saluran drainase untuk menampung dan mengalirkannya, sehingga menyebabkan kerusakan (Astuti, 2020). Banjir umumnya didefinisikan sebagai situasi di mana ketinggian air naik melebihi batas normal atau melampaui daya tampung saluran air pada umumnya. Selain itu, banjir juga bisa diartikan sebagai keadaan di mana aliran air meluap melebihi batas biasanya, sehingga menggenangi area di sekitarnya yang lebih rendah (Mutiarawati & Sudarmo, 2021).

Menurut Pradika et al., (2018), terdapat dua factor utama yang menyebabkan terjadinya banjir. Salah satunya adalah faktor alamiah, seperti intensitas hujan yang ekstrem atau naiknya permukaan air laut. Selain itu, tindakan manusia juga berperan besar dalam memicu banjir, contohnya adalah kurangnya kepedulian dalam menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa contohnya adalah penebangan hutan yang tidak terkendali, pembuangan sampah sembarangan, serta kepadatan pemukiman yang menyebabkan saluran air tidak mampu menampung aliran dengan optimal. Selain itu, minimnya kebijakan yang efektif dalam menangani dan mencegah banjir, ditambah dengan maraknya pembangunan yang menutupi

permukaan tanah, membuat banjir masih sering terjadi di berbagai daerah tepatnya indonesia ini (Utama et al., 2020).

Ketika masalah banjir belum ditanggulangi dengan komitmen yang jelas, dampak buruk yang timbul dapat merugikan banyak pihak, baik secara perorangan maupun secara kolektif. Salah satu efek yang langsung terlihat adalah terhambatnya kegiatan sehari-hari masyarakat, termasuk pekerjaan di kantor maupun kegiatan perdagangan. Selain itu, banjir juga berpotensi merusak atau menghilangkan barang-barang penting seperti dokumen, perhiasan, dan perabotan rumah tangga, yang akhirnya mengakibatkan kerugian material maupun non-material yang sulit diukur. Bencana banjir yang melanda suatu daerah juga menimbulkan efek negatif bagi lingkungan. Peristiwa ini dapat terjadi sewaktu-waktu dan kerap menimbulkan berbagai penyakit, bahkan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan pada lingkungan sekitar. Maka dari itu, setiap efek buruk yang muncul perlu segera diatasi guna mencegah kerusakan yang lebih parah di masa mendatang (Kurniadi et al., 2021)

Ketentuan dalam sebuah hukum dalam penanganan banjir telah diatur dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban dalam melindungi tanpa terkecuali semua penduduk dan seluruh lingkungan yang ada di indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanganan bencana meliputi berbagai tindakan, termasuk kebijakan pembangunan yang mengancam terjadinya bencana, upaya pencegahan, tanggap darurat, dan pemulihan. Semakin cepat langkah-langkah diambil, semakin besar dampak negatif yang dapat diminimalkan

dan semakin cepat proses pemulihan dapat dilaksanakan (Khairul Rahmat & Alawiyah, 2020).

Kabupaten Gresik adalah daerah yang kerap dilanda bencana banjir setiap tahun, yang tidak jarang mengakibatkan gangguan seperti kemacetan di sejumlah jalan utama di wilayah tersebut (Baskoro & Hertati, 2022). Salah satu kecamatan di Kabupaten Gresik yang kerap mengalami banjir setiap tahun adalah Kecamatan Gresik. Kawasan ini berada di area yang landai dengan topografi yang relatif datar. Hal ini menyebabkan air sulit mengalir dengan baik menuju laut atau sungai besar, sehingga sering kali terjadi genangan di permukaan tanah ketika hujan lebat terjadi. Di samping itu, sungai-sungai yang melewati daerah Gresik, seperti Sungai Pucang dan Sungai Buntung, kerap meluap ketika volume air meningkat. Hal ini diperparah oleh kondisi tanggul yang kurang memadai atau rusak, sehingga air sungai lebih mudah meluap ke area permukiman warga. Selain itu, infrastruktur drainase di Kecamatan Gresik belum mampu menangani volume air hujan yang tinggi. Banyak saluran pembuangan yang terhalang oleh timbunan sampah dan endapan, serta terdapat beberapa jalur air yang berukuran kecil dan tidak dalam, sehingga rentan meluap saat terjadi hujan lebat, khususnya di daerah Kecamatan Driyorejo akhir-akhir ini.

Bisa dilihat dalam data bencana banjir terjadi di tahun 2022 dan 2023 pada wilayah kabupaten gresik belakangan ini sudah beberapa kali tertimpa bencana banjir yang cukup meresahkan Masyarakat. Kejadian banjir ini telah menimbulkan dampak yang signifikan, di antaranya adalah kerusakan pada sejumlah rumah penduduk, jalan utama dan akses desa yang mengalami kerusakan hingga

menimbulkan lubang, serta lahan pertanian yang turut terdampak. Pada awal tahun 2023, bencana alam banjir di Kabupaten Gresik telah meredam Kecamatan, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Driyorejo (BPBD, 2024). Berikut adalah data terkait kabupaten gresik dan sekitarnya :

| Kecamatan | Bencana Alam Banjir | |
|-------------|---------------------|------|
| | 2022 | 2023 |
| Wringinanom | 5 | 2 |
| Driyorejo | 7 | 8 |
| Kedamean | 1 | 2 |
| Menganti | 3 | 6 |

Gambar 1.2 Bencana Alam Banjir

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, 2023

Berdasarkan data jumlah kejadian banjir di beberapa kecamatan di Kabupaten Gresik pada tahun 2022 dan 2023, dapat disimpulkan bahwa wilayah ini masih menghadapi tantangan serius dalam mengatasi bencana banjir. Kecamatan Driyorejo menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan banjir tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya, dengan jumlah kejadian meningkat dari 7 kejadian di 2022 bertambah 8 kejadian di 2023. Dengan itu menunjukkan bahwa langkah-langkah penanganan banjir yang dilakukan belum cukup efektif dalam mengurangi risiko banjir, mengingat Driyorejo adalah wilayah strategis yang banyak memiliki kawasan permukiman dan industri. Sementara itu, Kecamatan Menganti juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam jumlah kejadian banjir, dari 3 kejadian di 2022 bertambah sebanyak 6 kejadian di 2023. Lonjakan menandakan bahwa wilayah tersebut semakin rentan terhadap banjir, kemungkinan besar

disebabkan oleh perkembangan kawasan permukiman dan berkurangnya area resapan air yang berfungsi menampung kelebihan air hujan. Kecamatan Kedamean, meskipun secara angka memiliki kejadian banjir yang lebih kecil dibandingkan kecamatan lain, juga mengalami peningkatan jumlah dari 1 kejadian di 2022 bertambah sebanyak 2 kejadian di 2023, yang tetap memerlukan perhatian khusus untuk mencegah dampak yang lebih luas di masa mendatang. Sebaliknya, Kecamatan Wringinanom menunjukkan penurunan jumlah kejadian banjir dari 5 kali pada tahun 2022 menjadi hanya 2 kali pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya progres positif dalam upaya pengelolaan risiko banjir di wilayah tersebut.

Penurunan ini kemungkinan hasil dari implementasi langkah-langkah mitigasi seperti perbaikan drainase, pengerukan sungai, atau upaya pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Secara keseluruhan, meskipun ada satu kecamatan yang menunjukkan penurunan kejadian banjir, secara umum tren di wilayah ini memperlihatkan bahwa banjir masih menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian serius dan pendekatan terpadu. Langkah-langkah mitigasi bencana, seperti normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase, pengawasan tata ruang, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, menjadi sangat krusial untuk mengurangi dampak buruk banjir di masa mendatang. Selain itu, kerja sama antara pihak swasta, masyarakat, dan pemerintah harus ditingkatkan demi memastikan bahwa solusi yang diambil bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga setiap kecamatan dapat lebih siap menghadapi risiko banjir yang cenderung meningkat seiring dengan perubahan iklim dan tekanan akibat urbanisasi.

Jalan Sumpit Masih Banjir Meski Baru Dicor, Warga Tagih Janji Pemkab Gresik

Jemmi Purwodiarto - detikJatim

Jumat, 02 Feb 2024 15:10 WIB



Sebuah truk terperosok ke selokan lantaran jalan Sumpit, Gresik terendam banjir. (Foto: Dok. Istimewa)

Gambar 1.3 Berita Bencana Alam Banjir Jalan Sumpit

Sumber: Detik.com, diakses pada 10 Nov 2024

Hujan lebat melanda wilayah Gresik Selatan. Meski berlangsung hanya satu jam, jalan Sumpit di Driyorejo, Gresik, kembali terendam banjir. Curah hujan deras terjadi mulai pukul 11.30 hingga 12.30 WIB. Akibatnya, seluruh area jalan Sumpit terendam, termasuk bagian jalan yang baru saja diperbaiki dengan pengecoran setinggi 80 cm. Menurutnya, sebelumnya Jalan Sumpit kerap dilanda banjir, meski tidak sampai mencapai pasar atau permukiman penduduk. Setelah dilakukan perbaikan jalan, justru banjir semakin parah. Hal ini membuat warga Driyorejo menuntut janji Pemerintah Kabupaten Gresik untuk segera menangani masalah banjir tersebut. Akibat genangan air yang menutupi jalan, beberapa kendaraan yang

melintas mengalami kecelakaan, termasuk sebuah truk yang terjerembap ke dalam selokan karena tidak terlihat akibat banjir. (<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7173647/>, diakses pada 10 Nov 2024).

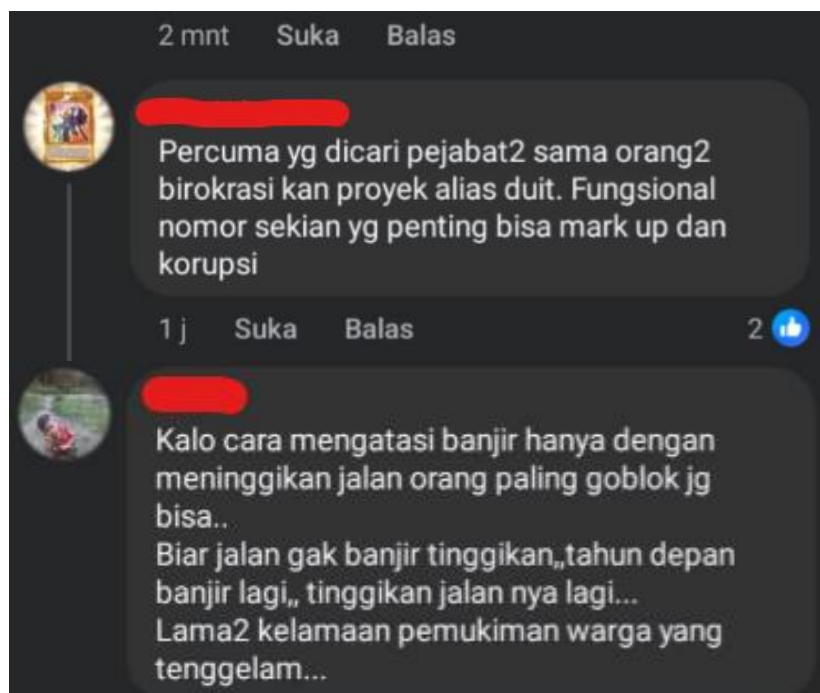
Tabel 1.1 Ketinggian Banjir Area Gresik Selatan

| Ketinggian Banjir | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tahun | Desa/Kelurahan | Ketinggian Air |
| 2024 | Karangandong | 20 – 70 cm |
| | Sumput | 30 - 80 cm |
| | Mojosarirejo | 20 - 70 cm |
| | Driyorejo | 20 - 40 cm |

Sumber: Kecamatan Driyorejo, 2024

Berdasarkan data ketinggian air di beberapa desa/kelurahan di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik pada tahun 2024, terlihat bahwa ketinggian air banjir bervariasi antar wilayah. Di Desa Karangandong mencatat ketinggian air banjir antara 20 hingga 70 cm, menunjukkan tingkat genangan yang cukup signifikan di beberapa titik wilayah. Sedangkan Desa Sumput memiliki ketinggian air tertinggi di antara wilayah lain, yaitu mencapai 30 hingga 80 cm, mengindikasikan bahwa desa ini merupakan salah satu lokasi dengan risiko banjir paling tinggi, kemungkinan disebabkan oleh posisi geografisnya yang rendah atau kurang optimalnya sistem drainase di wilayah tersebut. Setelah itu di Desa Mojosarirejo memiliki tingkat genangan air serupa dengan Karangandong, yaitu berada pada kisaran 20 hingga 70 cm. Sementara itu, Desa Driyorejo sendiri, yang menjadi pusat kecamatan, memiliki ketinggian air banjir paling rendah dibandingkan desa lainnya,

yaitu hanya berkisar antara 20 hingga 40 cm. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun genangan tetap terjadi, wilayah ini memiliki kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan desa lainnya, kemungkinan karena sistem drainase yang lebih terpelihara atau adanya upaya pengelolaan risiko banjir yang lebih intensif. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa banjir di Kecamatan Driyorejo masih menjadi permasalahan yang serius, dengan variasi tingkat genangan yang cukup tinggi di berbagai desa. Upaya mitigasi banjir, seperti normalisasi sungai, peningkatan kapasitas drainase, serta kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga lingkungan, mengurangi risiko dan dampak banjir di masa depan menjadi sangat penting.



Gambar 1.4 Komentar Masyarakat Sumpur terkait banjir

Sumber : Facebook diakses pada 09 Desember 2024

Seperti yang dikatakan di atas banjir akibat buruknya sistem drainase adalah bukti nyata dari perencanaan kota yang setengah hati, dan ironisnya, solusi yang

diambil justru sering memperburuk keadaan. Salah satu langkah yang kerap diambil, yakni meninggikan jalan untuk menghindari genangan, malah menjadi blunder yang menciptakan masalah baru. Ketika jalan-jalan ditinggikan tanpa perbaikan menyeluruh pada sistem drainase, air yang seharusnya mengalir dengan lancar justru tertahan, menciptakan kolam raksasa yang menggenangi rumah-rumah warga di sekitar. Ini adalah bentuk solusi tambal sulam yang tidak memikirkan dampak jangka panjang, seolah-olah banjir hanya masalah genangan di jalan raya, bukan bencana yang mengancam kehidupan masyarakat.

Terdapat penelitian yang dilakukan Shofwan & Prabhaswara (2023) mendapatkan hasil bahwa Kerentanan banjir di wilayah Kecamatan Driyorejo lebih didominasi pada wilayah yang berada di sebelah selatan. Ini disebabkan di wilayah tersebut terdapat Sungai Kali Mas. Dari hasil yang di dapat tersebut bisa dilakukan penelitian lebih lanjut terkait wilayah Driyorejo Selatan yang di maksud. Dari hal itu juga terdapat sebuah fakta bahwa di Desa Sumpu terjadi dimana meninggikan jalan hanya memindahkan masalah ke wilayah lain, terutama kawasan pemukiman yang lebih rendah. Ini adalah cermin ketidakpedulian terhadap prinsip keadilan lingkungan dan perencanaan berbasis komunitas. Sementara itu, air hujan yang tidak dapat disalurkan dengan baik terus menggenangi wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak rawan banjir. Bukannya mengurangi dampak, malah justru memperluas area bencana banjir ini. Pemerintah harus berhenti mengambil langkah-langkah instan yang hanya menyelesaikan masalah di permukaan tetapi meninggalkan luka mendalam di masyarakat. Perbaikan drainase yang holistik, penambahan sumur resapan, dan revitalisasi sungai serta saluran air adalah langkah-

langkah yang lebih berkelanjutan. Jika kita terus memilih jalan pintas tanpa mempertimbangkan ekosistem secara menyeluruh, maka banjir tidak hanya akan terus menjadi masalah tahunan, tetapi juga bukti kegagalan kita memahami akar permasalahan.

Dalam menangani masalah banjir di suatu wilayah, penerapan *Collaborative Governance* menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan banjir merupakan persoalan yang rumit, mencakup berbagai dimensi seperti lingkungan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur, sehingga tidak mungkin bisa diatasi oleh satu pihak saja. Banjir dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti tata kelola saluran air yang kurang baik, perkembangan wilayah perkotaan yang tidak terencana, dan minimnya kesadaran para masyarakat akan lingkungan dalam hal menjaga kebersihan dan kelestarian sekitar. Oleh sebab itu, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku bisnis sangat diperlukan untuk menciptakan dan menerapkan solusi yang tepat. Dengan kolaborasi ini, semua pihak dapat saling bertukar informasi, gagasan, serta sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi banjir. Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendorong perencanaan tata ruang dengan fokus pada mitigasi risiko bencana. Sementara itu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memelihara kebersihan lingkungan, misalnya dengan tidak membuang sampah secara sembarangan.

Di sisi lain, sektor swasta dapat membantu dengan investasi dalam infrastruktur yang tahan banjir, seperti pembangunan drainase yang lebih baik atau kawasan resapan air. Dengan kerja sama yang terencana, solusi yang dihasilkan menjadi

lebih efektif dan berkelanjutan, seperti normalisasi sungai yang melibatkan pendanaan swasta, edukasi masyarakat tentang cara mengurangi dampak banjir, hingga pengelolaan tata ruang yang lebih baik untuk mencegah banjir di masa depan. Pendekatan ini juga memastikan bahwa semua pihak yang terdampak banjir memiliki peran aktif dalam menemukan solusi, sehingga hasilnya lebih adil dan dapat diterima oleh semua kalangan. Maka dalam hal ini *Collaborative Governance* sangat diperlukan dalam mengatasi masalah banjir karena pendekatan ini memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk bekerja bersama secara efektif, berbagi tanggung jawab, dan memastikan bahwa solusi yang diambil bersifat holistik, berkelanjutan, dan mampu mengurangi dampak buruk banjir secara signifikan bagi masyarakat dan lingkungan.

Dengan mempertimbangkan fenomena terjadi sesuai dengan uraian di atas peneliti berinisiatif untuk mengangkat tema ini menjadi judul dalam penelitian yakni “***Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Desa Sumput Kabupaten Gresik***”. Sesuai dengan judul maka penelitian ini akan berfokus pada masalah banjir yang terjadi khususnya di daerah Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dalam latar belakang dan data yang ditampilkan sebelumnya, maka dirumuskan pertanyaan yang bisa di ambil dalam penelitian kali ini. Maka di buatlah judul yakni “***Bagaimana Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Desa Sumput Kabupaten Gresik?***”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini, melihat pada latar belakang lalu untuk rumusan masalah yang dalam penelitian kali ini untuk mencari tahu, serta melihat Bagaimana *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Banjir Di Desa Sumpat Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk manfaat yang bisa di ambil dalam penelitian ini yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari Bagaimana *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Banjir Di Desa Sumpat Kabupaten Gresik. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan berguna untuk penelitian lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan BUMDes.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk Peneliti Sendiri
 - a) Studi ini diperlukan untuk mendapatkan gelar sarjana di Program Studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
 - b) Serta memberikan informasi terkait tentang *Collaborative Governance* berkelanjutan melalui Penanggulangan Banjir Di Desa Sumpat Kabupaten Gresik, serta sebagai bentuk penerapan teori dan pengetahuan yang diperoleh pada saat kuliah.
2. Untuk Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi literatur kepustakaan atau referensi dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan.

3. Untuk Desa Sumpu Kabupaten Gresik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat serta evaluasi dalam pengembangan sebagai strategi Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Banjir Di Desa Sumpu Kabupaten Gresik.